

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara geografis Asia merupakan sebuah benua terluas dan mencakup 8,7% wilayah bumi<sup>1</sup>. Asia memiliki penduduk terpadat di dunia dan tentunya juga memiliki keberagaman budaya, agama, dan sosial masyarakat yang sangat kompleks. Ada sekitar 50 negara di benua ini. Negara-negara tersebut tentunya menganut sistem politik yang beragam. Namun pada dewasa ini, negara-negara di kawasan Asia sedang berupaya menerapkan sebuah konsep baru yang dinamakan demokrasi untuk diterapkan dalam nilai kehidupan sosial masyarakatnya.

Jika kita sedikit menilik kebelakang, gelombang demokratisasi yang melanda dunia pasca PD II benar-benar telah membawa era baru dalam sejarah politik di muka bumi ini, era baru tersebut dimulai dengan munculnya negara-negara bangsa yang baru merdeka atau negara dunia ketiga dengan berbagai macam bentuk pemerintahan. Di akhir dekade abad 20-an kita juga dikejutkan oleh bergulirnya gelombang demokratisasi ke tiga yang melanda dunia dan mencapai puncaknya di Asia, utamanya Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur.

---

<sup>1</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Asia> diakses pada 18 November 2011

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Pandangan Henry B. Madyo yang termuat dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberikan definisi bahwa sistem politik yang demokratis adalah didasari oleh beberapa nilai, yaitu : Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di tengah masyarakat yang terus berubah, pergantian pimpinan atau pejabat secara teratur, membatasi penggunaan kekerasan, mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman, serta menjamin tegaknya keadilan<sup>2</sup>.

Sementara para ahli hanya dapat memberikan batasan-batasan atau criteria mengenai demokrasi, seperti yang disampaikan Robert A. Dahl yang memberikan enam kriteria, yaitu : Pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat, pemilu yang bebas, adil dan berkesinambungan, kebebasan berekspresi, akses informasi yang terbuka luas, kebebasan berasosiasi, dan kewarganegaraan yang inklusif<sup>3</sup>.

Demokrasi selalu dikaitkan dengan pemerintahan yang mengutamakan rakyat atau lebih dikenal dengan pemerintahan rakyat. Namun dalam

---

<sup>2</sup> Budiardjo, Miriam Prof. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>3</sup> Ibid

pelaksanaan demokrasi terdapat variasi model demokrasi yang berkembang dalam pemerintahan di dunia. Tiap negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan demokrasi, tergantung dari sistem politik yang dianut. Pandangan-pandangan tersebut dapat menjadi indikator untuk mengukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu, demokrasi selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam pemerintahan negara.

Jika kita telusuri lebih lanjut, saat ini negara-negara di Asia sedang berusaha membangun demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun tentu saja, seperti yang telah diuraikan diatas, tiap negara berbeda cara penerapan dan tentu permasalahan yang dihadapinya relatif tidak sama. Proses transisi menuju ke demokrasi sering menimbulkan suatu permasalahan terkait dengan kendala yang dihadapi.

Ada beberapa negara di Asia yang dikategorikan sebagai negara yang sudah mampu menerapkan konsep demokrasi dengan sukses, sebagai contoh antara lain : Jepang, India, Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan. Namun masih ada juga negara yang dalam transisi menuju ke demokratisasi mengalami pergolakan, sebagai contoh : Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan juga beberapa negara di Asia Tengah. Kemudian dewasa ini, dikawasan Asia Barat atau yang lebih kita kenal dengan Timur Tengah, ramai terjadi tuntutan masyarakat dan pergolakan agar rezim diktator dan tangan besi segera mundur dan masyarakat berupaya menggulingkannya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar masyarakat mendapatkan kebebasan yang mereka impikan, dan kebebasan seperti ini terkandung dalam konsep demokrasi.

Di Myanmar misalnya, demokrasi bisa dikatakan masih sangat jauh perwujudannya dikarenakan junta militer masih berkuasa penuh dan membungkam masyarakatnya. Hal ini sering juga dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer. Di Pakistan, pembatasan akses informasi bagi masyarakat dan penyensoran media massa merupakan salah satu wujud masih lemahnya aspek demokrasi di negara ini. Di Thailand, meskipun saat ini perdana menteri dipilih dan ditetapkan oleh pemilihan umum, namun bayang-bayang kudeta militer masih membayangi. Tidak ada yang menjamin tidak akan ada terjadinya kudeta militer lagi.

Sedangkan di Malaysia, terjadi diskriminasi terhadap etnis Cina dan India yang menggambarkan pembungkaman kebebasan berekspresi masyarakat. Serta kekuasaan Front Nasional seakan tidak bisa tergulingkan setelah memimpin sebagai partai penguasa selama bertahun-tahun. Begitu juga beberapa negara di kawasan timur tengah yang masih dipimpin oleh monarki ataupun pemimpin dengan tangan besi. Di Filipina, terjadi pergolakan yang menuntut presiden Arroyo mundur dikarenakan tidak menjalankan roda demokrasi dengan baik dengan cara melakukan nepotisme.

Upaya untuk mewujudkan demokrasi memang tidak mudah. Banyak kendala-kendala dan juga permasalahan dalam proses ini semua. Untuk itu, perlu adanya kerjasama ditingkat kawasan yang nantinya akan saling bantu-membantu dalam perwujudan pembangunan politik di kawasan yang tentunya akan menciptakan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dengan berbagai pengalaman yang dialami dalam proses menuju demokrasi selama beberapa tahun, akhirnya Indonesia didaulat dan diakui menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia berdampingan dengan Amerika Serikat diperingkat pertama dan India diposisi kedua. Tentunya predikat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tersebut membawa angin positif bagi Indonesia, baik dalam lingkup kawasan Asia maupun dalam kancah internasional.

Mendorong pengembangan demokrasi dan mempromosikan demokrasi kemudian menjadi sebuah bagian dari peran politik luar negeri Indonesia di kawasan Asia pada khususnya dan Internasional pada umumnya.

Melihat kondisi demokrasi yang ada di kawasan Asia tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri, mengambil suatu langkah yang akan memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi menyelenggarakan forum Internasional dengan mengundang negara-negara sahabat, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menyelenggarakan sebuah forum demokrasi Internasional yang disebut *Bali Democracy Forum* sebagai ajang untuk mendorong pengembangan demokrasi dan mempromosikan demokrasi.

Bali sekarang bukan saja dikenal sebagai *Paradise Island* dengan tempat pariwisata dan tradisi budaya yang sangat menarik tetapi juga menjadi tempat bagi inspirasi demokrasi melalui pelaksanaan *Bali Democracy Forum* yang direncanakan akan dilakukan setiap tahun. Hal ini merupakan inisiatif yang fenomenal dalam kerjasama kawasan melalui pertukaran pengalaman dan best

practices untuk mendorong kuatnya demokrasi yang tidak dipaksakan, tetapi tumbuh dan berkembang dari kekuatan dan kemampuan dari dalam. Selain itu juga inisiatif ini akan memberikan inspirasi dan momentum bagi pengembangan demokrasi di dalam negeri.

Inisiatif penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* ini merupakan inspirasi yang sangat hebat dalam strategi dan misi diplomasi Indonesia, khususnya mendorong pengembangan dan mempromosikan demokrasi di kawasan Asia. Forum ini juga merupakan momentum sejarah dimana perwakilan negara-negara Asia berbicara tentang demokrasi yang sebelumnya masih menjadi isu yang cukup *sensitive* di kawasan Asia<sup>4</sup>.

Forum ini akan diadakan setiap tahun pada bulan Desember setiap tahunnya. Forum ini akan menjadi sebuah forum tahunan antar pemerintah di tingkat menteri, setingkat menteri luar negeri atau kementerian berbeda, pejabat setingkat menteri, atau wakil menteri luar negeri. Bahkan dalam beberapa kali pelaksanaan, kepala negara, seperti Sultan Brunnei Darussalam Sultan Hassanah Bolkihah, Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak, dan beberapa kepala negara lain hadir langsung dalam perhelatan ini. Tentunya forum ini diikuti negara-negara demokrasi dan negara-negara yang beraspirasi menjadi lebih demokratis di kawasan Asia dan sekitarnya.

---

<sup>4</sup> [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3138&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3138&option=com_content&task=view) diakses pada 18 November 2011.

Selain adanya negara peserta, forum ini juga dihadiri oleh negara-negara peninjau. Negara-negara peninjau (*observer*) ini adalah negara-negara yang dirasa sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal demokrasi, dan negara yang penerapan demokrasinya sudah sangat efektif. Kebanyakan negara-negara peninjaunya adalah delegasi dari negara-negara di kawasan Eropa, Amerika Serikat. Pada akhir setiap *Bali Democracy Forum* dihasilkan sebuah *Chairman's Statement*, yang merupakan refleksi pandangan dan komitmen negara-negara peserta untuk melakukan kerjasama di bidang pemajuan demokrasi<sup>5</sup>.

*Bali Democracy Forum* tidak terkonsentrasi pada satu sistem politik tertentu akan tetapi semua sistem politik yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan demokrasi. Oleh karena itu setiap negara dengan sistem politik apapun yang memiliki kemauan untuk mengembangkan demokrasi dapat ikut untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi. Kehadiran dalam forum ini untuk berbagi pengalaman, pemikiran dan ide untuk kerjasama meningkatkan demokrasi, tidak peduli sistem politik apa yang dikembangkan, dari bagian Asia mana berasal atau budaya yang mempengaruhi. Tidak ada demokrasi yang sempurna, demokrasi tidak pernah berakhir dan masih terus berkembang.

Dalam rangka pembukaan *Bali Democracy Forum* yang pertama pada tahun 2008 lalu, pemerintah Indonesia juga meresmikan *The Institute for Peace and Democracy* yang merupakan organisasi nirlaba independen yang mendukung Forum dengan mengorganisasi penyelenggaraan lokakarya, melaksanakan studi

---

<sup>5</sup> <http://www.deplu.go.id/Pages/EventDisplay.aspx?IDP=311&l=id>. Diakses pada 18 November 2011.

dan penelitian, networking dengan lembaga organisasi serta menerbitkan paper yang intinya adalah mengimplementasikan hasil-hasil dari *Bali Democracy Forum*. Lembaga independen ini berkedudukan di Kampus Jimbaran Universitas Udayana, Bali, yang didukung penuh oleh Departemen Luar Negeri<sup>6</sup>. Tugas pokoknya adalah mendorong pertukaran pandangan dan pengalaman melalui berbagai kegiatan seperti antara lain *workshop*, seminar, kuliah umum, *election visit*, pelatihan bagi aparatur negara, dan memperluas jejaring. Untuk jangka-panjang, IPD diharapkan menjadi *center of excellence* di kawasan maupun di tingkat global.

*Bali Democracy Forum I* diselenggarakan pada 10-11 Desember 2008 dengan tema *Building and Consolidating Democracy: a Strategic Agenda for Asia*, di mana Australia bertindak sebagai *co-chair*. *Bali Democracy Forum II* diselenggarakan pada tanggal 10-11 Desember 2009, mengambil tema *Promoting Synergy between Democracy and Development in Asia: Prospects for Regional Cooperation* dengan Jepang sebagai *co-chair*. *Bali Democracy Forum III* diselenggarakan pada 9-10 Desember 2010 dengan tema *Democracy and the Promotion of Peace and Stability* dan Korea Selatan sebagai *co-chair*. *Bali Democracy Forum IV* diselenggarakan pada 8-9 Desember 2011 dengan tema *Enhancing Democratic Participation in Changing World, Responding to Democratic Voices*.

---

<sup>6</sup> [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3138&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=3138&option=com_content&task=view)  
Diakses pada 18 November 2011.



Minat dan ketertarikan untuk menghadiri *Bali Democracy Forum* terus meningkat dari tahun ke tahun sejak penyelenggaraan pertama tahun 2008, baik dari kawasan Asia maupun dari luar kawasan seperti Afrika dan Eropa. Pada *Bali Democracy Forum I*, jumlah negara yang hadir baik sebagai peserta maupun observer adalah 40 negara, *Bali Democracy Forum II* sejumlah 48 negara peserta dan observer, dan *Bali Democracy Forum III* sejumlah 86 negara peserta dan observer. Ini menunjukkan makin tingginya apresiasi negara-negara Asia maupun kawasan lain kepada *Bali Democracy Forum* dan bagaimana *Bali Democracy Forum* dan demokrasi telah menjadi agenda strategis di kawasan<sup>7</sup>.

Pada akhirnya, *Bali Democracy Forum* diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengejar cita-cita demokrasi melalui dialog dan kerjasama partical. Ini adalah forum yang didedikasikan untuk mempromosikan kerjasama regional dan internasional di bidang demokrasi, mempromosikan dan memfasilitasi dialog dan kerjasama dalam membangun kapasitas nasional dalam pemerintahan dan pembangunan politik di negara-negara kawasan Asia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat diambil kesimpulan melalui pengambilan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dengan mengajukan pertanyaan :

Apa peranan *Bali Democracy Forum* dalam upaya mengembangkan dan mempromosikan wacana demokrasi di kawasan Asia?

---

<sup>7</sup> <http://www.deplu.go.id/Pages/EventDisplay.aspx?IDP=311&l=id> diakses pada 18 November

### **C. Kerangka Dasar Teori**

Teori yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan diatas adalah :

#### **1. Teori Peranan**

Peran merupakan sebuah konsep yang dulu biasa dikembangkan dalam ilmu sosial dan psikologi sosial untuk mengidentifikasi pola karakteristik actor yang menduduki posisi tertentu. Hal ini berarti bahwa setiap individu, organisasi, atau negara sebagai aktor yang diberi posisi tertentu diharapkan untuk bertindak sebagaimana tindakan itu diambil sesuai dengan posisi yang dijabat.

Dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Peran adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi, baik yang berpengaruh dalam organisasi maupun dalam negara. Teori peran berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang actor politik. Dalam teori peran, aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilaku dengan norma yang berlaku dalam peran yang dijalannya. Jadi, kegiatan politik individual selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Mas'oed, Mochtar. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisisasi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1989

Menurut Alan C. Isaak, harapan dapat muncul dari dua jenis sumber. Pertama berasal dari harapan orang lain terhadap seorang aktor politik. Kedua, harapan itu juga dapat muncul dari cara pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapan sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan<sup>9</sup>.

Menurut Jack C. Plano yang dimaksud dengan teori peranan dalam kamus analisa politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seorang yang menduduki posisi tertentu<sup>10</sup>.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan dalam sebuah organisasi, baik regional maupun internasional berdasarkan tuntutan atau harapan terhadap suatu hal yang telah disesuaikan dengan perilaku dan norma yang berlaku dalam peran yang dijalankan.

Peranan *Bali Democracy Forum* ini tentunya tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Forum ini merupakan forum internasional yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan manfaat dalam bidang demokrasi khususnya. Didalam forum ini akan diadakan suatu pembahasan mengenai pendapat para negara peserta yang hadir untuk menyampaikan pengalaman maupun pemikiran masing-masing soal demokrasi di negaranya. Hal ini mungkin terlihat seperti hal yang biasa saja. Namun, forum ini adalah forum

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali, 1986.

pertama di dunia yang membahas tentang suatu konsep yang dinamakan demokrasi dan terbukti efektif dalam mempromosikan wacana demokrasi.

Sebagaimana kita ketahui, pembangunan demokrasi di setiap negara berbeda-beda, berdasarkan karakter dan nilai masing-masing bangsa. Berdasarkan latar belakang politik, ekonomi dan sosial masing-masing negara. Tidak ada satu model demokrasi yang berlaku bagi semua masyarakat. Oleh karena itu, dalam wadah forum ini, para delegasi negara diberikan ruang untuk saling bertukar pikiran, agar mereka bisa melihat sudut pandang lain tentang apa makna demokrasi secara luas.

Selain hal itu, forum ini juga berperan aktif dalam mempererat kerjasama di kawasan, bukan hanya kerjasama politik dan keamanan, namun juga ekonomi dan sosial budaya. Dengan hadirnya delegasi-delegasi negara peserta, tentunya juga akan semakin mempererat hubungan antara negara-negara peserta. Yang nantinya akan membawa angin positif bagi masing-masing negara.

Isu demokrasi juga selalu dikaitkan dengan perkembangan ekonomi dan modernitas. Dalam forum ini juga hadir negara-negara maju baik dalam kehidupan demokrasi maupun perekonomiannya yang bertindak sebagai peninjau. Negara-negara tersebut merupakan sebuah model yang bisa menjadi contoh mengenai keselarasan yang terjadi antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Tentunya mereka akan senantiasa membantu dan memberikan masukan, arahan dan pengalaman mengenai hal tersebut.

Satu lagi peran konkret dari *Bali Democracy Forum* ini adalah dengan mencanangkan agenda-agenda dalam rangka promosi demokrasi seperti seminar mengenai pemilu yang demokratis, *workshop*, anti korupsi, dan penelitian terkait demokrasi. Hal ini yang dirasa merupakan suatu wujud peran nyata dalam usaha mengembangkan dan mempromosikan wacana demokrasi

#### **D. Hipotesa**

*Bali Democracy Forum* sangat berperan dalam usaha pengembangan dan promosi nilai-nilai demokrasi di kawasan Asia. Forum ini merupakan forum pertama *inter government* di kawasan Asia yang membahas dan mengkaji mengenai demokrasi. *Bali Democracy Forum* menjadi suatu wadah penyaluran pemikiran mengenai perkembangan politik dan demokrasi di kawasan Asia melalui dialog dan diskusi. *Bali Democracy Forum* juga membantu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, dan pembangunan politik bagi negara di Asia yang mempunyai ketertarikan untuk membangun pemerintahannya menjadi lebih demokratis

#### **1. Jangkauan Penelitian**

Suatu penelitian yang baik memerlukan adanya pembatasan masalah yang dimaksudkan agar pembahasan lebih terarah dan tidak terlalu luas. Penulis mengambil pokok permasalahan dari sejak diselenggarakan *Bali Democracy Forum I* pada Desember 2008 sampai dengan pelaksanaan *Bali Democracy Forum IV* pada November 2011.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan acuan bagi peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif artinya analisa hanya sebatas deskripsi atas fakta-fakta maupun data yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan metodologi pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka seperti buku-buku ilmiah, majalah, koran, *website*, internet serta referensi-referensi yang didapat oleh penulis.

## **3. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dibagi dalam lima bab. Secara garis besar dibawah ini diuraikan dengan singkat mengenai sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : DEMOKRASI DI KAWASAN ASIA**

Bab ini membahas tentang situasi dan perkembangan nilai-nilai demokrasi di Asia pada dua dekade terakhir.

### **BAB III : PENYELENGGARAAN BALI DEMOCRACY FORUM**

Bab ini akan membahas tentang sejarah terbentuknya *Bali Democracy Forum*, penyelenggaraan, dan semua hal mengenai forum ini.

### **BAB IV : PERAN BALI DEMOCRACY FORUM**

Bab ini akan membahas tentang peran *Bali Democracy Forum* dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi di kawasan Asia.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi dari hasil penelitian dan temuan-temuan dalam penyusunan skripsi ini.